

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis yang melanda perekonomian Indonesia pada pertengahan tahun 1997, telah berpengaruh negatif terhadap kondisi makro ekonomi secara menyeluruh dan khususnya terhadap kesejahteraan penduduk. Jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan telah meningkat secara drastis karena dampak krisis tersebut.

Besarnya dampak krisis terhadap kemiskinan pada awalnya diperdebatkan antara berbagai metodologi pengukuran. Krisis di percaya telah memperburuk kemiskinan terutama melalui kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan komoditi-komoditi lainnya karena depresiasi nilai rupiah yang sangat cepat. Kenaikan harga-harga ini khususnya terhadap barang-barang input produksi impor, telah menyebabkan kontraksi sektor-sektor riil dan sektor formal secara umum. Situasi ini kemudian di ikuti oleh banyaknya kebangkrutan dan kegagalan bisnis, khususnya yang tergantung pada sumber-sumber dan komponen dari luar negeri. Sebagai akibatnya, tekanan pada kesempatan kerja di sektor informal perkotaan menjadi semakin besar, permintaan atas barang-barang dan jasa-jasa melemah, dan tingkat produksi serta pendapatan dari pertanian di pedesaan cenderung menurun.

Upaya-upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin terus dilakukan termasuk sejak masa orde baru. Namun demikian jumlah penduduk miskin tetap tidak bisa dihilangkan sama sekali walaupun dari waktu ke waktu terus berkurang.

Naiknya jumlah penduduk miskin sebanyak 3,95 juta orang per maret 2006 dinilai sebagai kegagalan pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memenuhi janji kampanye. Menurut ekonom dari *Institute for development of economic and finance (INDEF)*, **Imam Sugema** jumlah penduduk miskin mencapai 22%. Salah satu indikasi adalah penerima beras miskin 48 juta orang.

TABEL 1.1
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA
PERIODE 1990-2005

| Tahun | Batas Miskin (Rp) | | Penduduk Miskin (%) | | | Jumlah penduduk miskin (juta) | | |
|-------|-------------------|---------|---------------------|-------|-------|-------------------------------|------|-------|
| | Kota | Desa | Kota | Desa | Total | Kota | Desa | Total |
| 1990 | 20.614 | 13.295 | 16,8 | 14,3 | 15,1 | 9,4 | 17,8 | 27,2 |
| 1993 | 27.905 | 18.244 | 13,4 | 13,8 | 13,7 | 8,7 | 17,2 | 25,9 |
| 1995 | 38.246 | 27.413 | 9,7 | 12,3 | 11,3 | 7,2 | 15,3 | 22,5 |
| 1996 | 42.032 | 31.366 | 13,6 | 19,9 | 17,7 | 9,6 | 24,9 | 34,5 |
| 1998 | 96.959 | 72.780 | 21,9 | 25,7 | 24,2 | 17,6 | 31,9 | 49,5 |
| 1999 | 89.845 | 69.420 | 15,1 | 20,2 | 18,2 | 12,4 | 25,1 | 37,5 |
| 2000 | 91.632 | 73.648 | 14,6 | 22,38 | 19,14 | 12,3 | 26,4 | 38,7 |
| 2001 | 100.001 | 80.382 | 97,9 | 34,84 | 18,41 | 8,6 | 29,3 | 37,9 |
| 2002 | 130.499 | 96.512 | 14,46 | 24,10 | 18,20 | 13,3 | 25,1 | 38,4 |
| 2003 | 138.803 | 105.888 | 13,57 | 20,23 | 17,42 | 12,2 | 25,1 | 37,3 |
| 2004 | 144.801 | 111.574 | 12,13 | 20,11 | 16,66 | 11,4 | 24,8 | 36,2 |
| 2005 | 150.799 | 117.259 | 11,37 | 19,51 | 15,97 | 12,4 | 22,7 | 35,1 |

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2006

Dari data diatas dapat dilihat jumlah penduduk miskin yang paling besar yaitu pada tahun 1998 yang mencapai 49,5 juta jiwa dari total penduduk Indonesia. Pada masa ini, kemiskinan meningkat karena dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun tersebut yang mengakibatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja sehingga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan mengakibatkan menurunnya pula kesejahteraan mereka. Dari tahun ke tahun angka kemiskinan tersebut semakin menurun walaupun belum

sepenuhnya hilang tetapi setidaknya telah menggambarkan adanya program pengentasan kemiskinan tersebut.

Demikian gambaran fenomena kemiskinan di Indonesia, yang telah membuat pemerintah berkonsentrasi untuk terus melakukan upaya penanggulangan kemiskinan yang tak berujung pangkal tersebut.

Kenaikan BBM yang menyebabkan inflasi berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk miskin, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hamongan Ritonga (2006), Peneliti Badan pusat statistik (BPS) yang mengatakan:

Dengan inflasi yang tinggi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menyebabkan 2,5 juta kepala keluarga (KK) atau 10 juta orang menjadi miskin. Mereka yang sebelumnya tidak termasuk kategori miskin atau mendekati miskin karena memiliki penghasilan diatas Rp 175.000 per kepala per bulan kini menjadi layak mendapat bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah karena masuk dalam kategori miskin dan mendekati miskin.

Miskin adalah jika seseorang mempunyai pendapatan dan tidak dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum atau jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Kemiskinan yang terjadi terutama di daerah pedesaan bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya, yang antara lain ditandai dengan :

lemahnya keinginan untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya produktivitas, terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendapatan dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan (Mubyarto, 1996:118)

Penduduk miskin adalah penduduk yang tingkat pendapatannya masih berada di bawah kebutuhan hidupnya. Untuk mencapai tingkat kebutuhan minimnya inilah yang sering disebut sebagai garis kemiskinan, dengan kata lain penduduk yang tingkat pendapatannya masih berada di bawah garis kemiskinan inilah yang disebut kelompok penduduk miskin.

Garis kemiskinan diperoleh dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari seperti yang dianjurkan pada Widyakarya Pangan dan Gizi 1988, sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum untuk perumahan, bahan bakar, sandang, pendidikan, kesehatan dan transport merupakan kebutuhan minimum bukan makanan yang harus dipenuhi.

Ada beberapa alasan penting mengapa kemiskinan perlu mendapat perhatian untuk ditanggulangi seperti yang diungkapkan oleh **Prijono Tjiptoherijanto** dalam buku *Prospek Perekonomian Indonesia dalam rangka globalisasi* (1997:71), diantaranya:

- (a) Kemiskinan merupakan kondisi yang kurang beruntung karena bagi kaum miskin akses terhadap perubahan politik dan istitusional sangat terbatas;
- (b) Kemiskinan merupakan kondisi yang cenderung menjerumuskan orang miskin ke dalam tindak kriminalitas; dan
- (c) bagi para pembuat kebijaksanaan, kemiskinan itu sendiri juga mencerminkan kegagalan kebijaksanaan pembangunan yang telah diambil pada masa lampau.

Kemiskinan yang terjadi di Jawa Barat penting untuk dikaji karena berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan membawa kemajuan daerah, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi juga karena

kemiskinan merupakan salah satu masalah yang terdapat dalam lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*), yaitu suatu rangkaian kekuatan yang mempengaruhi satu sama lain sedemikian rupa, sehingga menimbulkan satu keadaan dimana daerah akan tetap miskin dan akan mengalami kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik.

Dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan, tiga faktor yang diduga menyebabkan tingginya kemiskinan adalah kepemilikan modal yang rendah didalam masyarakat pedesaan. Masyarakat desa pada umumnya tidak memiliki banyak lahan untuk dijadikan modal usaha bahkan banyak diantaranya tidak memiliki lahan sama sekali. Mereka hanya bekerja sebagai buruh tani dan buruh bangunan yang penghasilannya kecil.

Selain itu, tingginya beban tanggungan di masyarakat pedesaan diduga karena kurangnya kesadaran masyarakat di dalam membina rumah tangga. Pandangan yang selama ini tumbuh di masyarakat desa yaitu banyak anak banyak rezeki. Pada kenyataannya, hal tersebut tidak selamanya benar karena pandangan tersebut bisa salah dimana semakin banyak anak maka beban tanggungan pun akan bertambah. Selain banyaknya anak, semakin tingginya beban ketergantungan dapat dipengaruhi pula oleh orang tua atau saudara yang menetap bersama tanpa pekerjaanyang tetap atau belum memiliki pekerjaan.

Faktor terakhir yang diduga mempengaruhi kemiskinan yaitu rendahnya tingkat pendidikan. Pada masa sekarang ini, pendidikan sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup. Selain ilmu pengetahuan dapat lebih berkembang, dengan pendidikan keterampilan pun dapat ikut berkembang juga.

Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang maka kesempatan orang tersebut untuk sukses akan semakin besar pula.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah kemiskinan, dengan membatasi variabel bebas pada aspek kepemilikan modal, beban tanggungan dan tingkat pendidikan, sehingga penulis mengambil judul “ **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN ABSOLUTE DI JAWA BARAT (SUATU KASUS PADA MASYARAKAT DESA WINDUHERANG KABUPATEN KUNINGAN)**”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pengaruh kepemilikan modal, beban tanggungan, dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan absolute di Jawa Barat dalam kasus ini pada masyarakat Desa Winduherang Kabupaten Kuningan. Adapun lingkup permasalahan yang akan menjadi bahan kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan modal terhadap kemiskinan absolute?
2. Bagaimana pengaruh beban tanggungan terhadap kemiskinan absolute?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan absolute?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk:

- a. Memperoleh kejelasan pengaruh kepemilikan modal, beban tanggungan dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan.
- b. Menentukan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kemiskinan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu ekonomi pembangunan khususnya dalam bahasan kemiskinan

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menangani masalah kemiskinan, khususnya kemiskinan yang terdapat di Jawa Barat.